

## **ABSTRAK**

### **PERGERAKAN MASSA**

Suatu Kajian Proses dan Mekanisme Mengumpulkan dan Menggerakkan Massa pada Kejadian Konflik Sosial di Desa Agom dan Desa Balinuraga

Oleh

**Drs. Ikram, M.Si, dkk**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur sosial dan perubahan sosial, melakukan analisis konflik dengan melihat relasi sosial, dan menemukan motivasi keterlibatan aktor serta menganalisis mekanisme pergerakan massa dalam menyerang dan atau saling menyerang pada saat terjadi konflik antara masyarakat Kecamatan Way Panji dan Kecamatan Kalianda atau konflik dan penyerangan di Desa Balinuraga. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Kasus yang akan dilihat tentang proses pengorganisasian massa dan keterlibatan aktor politis dalam konflik di desa Balinuraga sehingga batasan waktu yang dijadikan acuan adalah pada masa-masa krisis konflik. Data primer merupakan sumber utama penelitian dan data sekunder digunakan untuk memperkuat dan memverifikasi data. Alat pengumpul data yang digunakan adalah teknik wawancara mendalam dan observasi lapangan. Teknik analisis yang digunakan melalui tiga tahap utama, yaitu membuat transkrip wawancara, memilah-milah dan menyusun data ke dalam kategori yang berbeda dan disesuaikan dengan fokus permasalahan, membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan, dan menganalisis lebih detail dengan meng-coding data yang dibedakan menjadi 4 bagian yaitu Eskalasi, Pembentukan Identitas, Pembentukan Aktor, dan Pergerakan Massa. Temuan-temuan menunjukkan bahwa ada kecenderungan untuk mendangkalkan kekerasan atau konflik. Kekerasan atau tidak semata dipandang sebagai semata-mata sebuah peristiwa, melainkan sebagai sebuah konsekuensi dari proses yang kompleks. Demikian juga dengan mudahnya pergerakan massa dikarenakan banyaknya bermunculan atau dimunculkan orang kuat desa yang mampu mempengaruhi banyak orang untuk memenuhi kepentingan orang kuat desa.

***Kata kunci: konflik, pergerakan massa***

## DAFTAR ISI

HALAMAN MUKA	
HALAMAN PENGESAHAN	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	3
1. Latar Belakang	
2. Permasalahan Penelitian	
3. Tujuan Penelitian	
4. Manfaat Penelitian	
BAB II Kerangka Konseptual	7
1. Kemajemukan dan Perubahan Sosial	
2. Relasi Sosial dalam Pergerakan Massa	
3. Pergerakan Massa	
BAB III METODE PENELITIAN	17
1. Lokasi Penelitian	
2. Kebutuhan dan Jenis Data	
3. Teknik dan Proses Pengumpulan Data	
4. Teknik Pengolahan Data	
BAB IV Deskripsi Wilayah Penelitian	23
1. Kabupaten Lampung Selatan	
2. Desa Balinuraga dan Desa Agom	
3. Asal Mula Konflik Etnis Bali	
4. Kronologis Konflik	
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	34
1. Konflik dengan Kekerasan	
2. Memahami Proses Konflik dengan Kekerasan	
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	45
A. Kesimpulan	
B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	47

**DIPA FISIP**

**LAPORAN PENELITIAN**



**PERGERAKAN MASSA**

**Suatu Kajian Proses dan Mekanisme Mengumpulkan dan Menggerakkan Massa pada Kejadian Konflik Sosial di Desa Agom dan Desa Balinuraga**

**Oleh :**

**Drs. Ikram, M.Si (Ketua)**  
**Drs. Usman Raidar, M.Si (Anggota)**  
**Drs. Susetyo, M.Si (Anggota)**  
**Teuku Fahmi, S.sos, M.Krim (Anggota)**

**Dibiayai oleh Dana DIPA FISIP Universitas Lampung Dengan Nomor Kontrak: 499/UN26.16/KU.02.00.01/2018**

**JURUSAN SOSIOLOGI**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**TAHUN 2018**

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENELITIAN DIPA FISIP**

- Judul Penelitian** : Pergerakan Massa (Suatu Kajian Proses dan Mekanisme Mengumpulkan dan Menggerakkan Massa pada Kejadian Konflik Sosial di Desa Agom dan Desa Balinuraga)
- Bidang Penelitian** : Ilmu Sosial
- Ketua Tim Pengusul**
- a. Nama : Drs. Ikram, M.Si.  
b. Jenis Kelamin : Laki-laki  
c. NIP/NIDN : 196106021989021001/0002066212  
d. Disiplin Ilmu : Sosiologi  
e. Pangkat/Golongan : Pembina/IV a  
f. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
g. Fakultas / Jurusan : FISIP/Sosiologi  
h. Alamat : Puri Maerakaca Blok DD No. 16, Lampung  
i. Telp Kantor : (0721) 704656  
j. HP/e-mail : 081379629554/ikram\_badila@yahoo.com
- Anggota Peneliti**
- a. Nama Lengkap : Drs. Usman Raidar, M.Si/001911605  
Drs. Susetyo, M.Si/004105814  
Teuku Fahmi, S.Sos, M.Krim/0030058501  
Lokasi Penelitian : Desa Jatimulyo, Kec Jatiagung, Kab Lampung Selatan  
Biaya Penelitian : Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)

Bandar Lampung, Agustus 2018

Ketua Jurusan Sosiologi

Drs. Ikram, M.Si  
NIP 196106021989021001

Ketua Peneliti

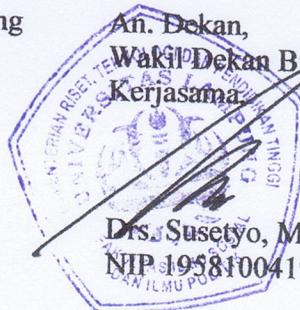
Drs. Ikram, M.Si  
NIP 196106021989021001

Menyetujui,  
Ketua LPPM Universitas Lampung



Warsono, Ph.D  
NIP.196302161987031003

An. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kerjasama



Drs. Susetyo, M.Si  
NIP 195810041989021001

## PERGERAKAN MASSA

Suatu Kajian Proses dan Mekanisme Mengumpulkan dan Menggerakkan Massa pada Kejadian Konflik Sosial di Desa Agom dan Desa Balinuraga

### 1. Pendahuluan

Garry Van Klinken (2007) melalui karyanya - Perang Kota Kecil - memberikan serangkaian analisis yang berbeda tentang konflik. Metode Studi Kasus dipilih sebagai bingkai analisis berbagai konflik etnis dan kekerasan komunal yang terjadi di Indonesia. Klinken mampu memberikan gambaran bahwa analisis konflik tidak hanya dilihat melalui persepektif sosial-kultural yang belakangan ini seakan-akan menjadi satu-satunya cara melihat fenomena konflik.

Kajiannya dilakukan di beberapa daerah yang mengalami konflik dan kekerasan komunal antar etnis, baik yang terjadi sebelum ataupun beberapa tahun pasca reformasi. Kalimantan Barat, Poso, Ambon, Maluku Utara, dan Kalimantan Tengah merupakan wilayah kajian konfliknya. Klinken mencoba memperlihatkan bahwa meletusnya kekerasan komunal atau konflik etnis di beberapa daerah tersebut sangat erat kaitannya dengan ketidakstabilan iklim politik nasional pada masa tersebut. Kekerasan komunal yang terjadi merupakan bentuk dari pengalihan isu (Klinken, 2007: 12).

Klinken menggunakan Teori *Dynamic of Contention* karya Doug McAdam, Sidney Tarrow dan Charles Tilly (2004) sebagai lensa analisis ketidakstabilan iklim politik yang berakibat konflik. Teori *Dynamic of Contention* menjelaskan bahwa terdapat lima proses kunci dalam memahami perseteruan politik yaitu pembentukan identitas, eskalasi konflik, polarisasi, pergerakan massa, dan pembentukan aktor.

Keberhasilan Klinken dalam mengaplikasikan Teori *Dynamic of Contention* menjadi inspirasi bagi penelitian ini dalam melihat fenomena konflik yang terjadi di Desa Balinuraga yang melibatkan masyarakat etnis asli Lampung di Desa Agom dan etnis Bali di Desa Balinuraga. Perbedaan antara penelitian ini dan karya Klinken adalah terletak pada melihat kesemua tahap dalam Teori *Dynamic of Contention* dalam satu kasus, yaitu konflik Balinuraga dan menjadikan proses pergerakan Massa dalam konflik sebagai fokus utama kajian, sedangkan ke-4 tahap lainnya (pembentukan identitas, eskalasi konflik, polarisasi, dan pembentukan aktor) dilihat dan dianalisis sebagai bagian penting untuk dapat melakukan analisis yang komprehensif tentang pergerakan massa.

Konflik tidak secara serta-merta muncul karena alasan politis atau keterlibatan aktor diluar masyarakat tersebut (faktor pemicu), konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Balinuraga dan masyarakat Desa Agom di Kecamatan Kalinada (Lampung Selatan) diduga memang telah terjadi dalam kurun waktu yang lama. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa, konflik yang terjadi pada akhir tahun 2012 memang diduga dipicu oleh kejadian kecil yang mungkin ditanggapi oleh kepentingan aktor lain dengan alasan yang mungkin bersifat politis, namun dalam tubuh masyarakat sendiri memang telah terjadi sebuah ketegangan yang cenderung berlangsung sudah cukup lama (faktor *lattensi*).

Berangkat dari berbagai asumsi dan informasi di atas, penelitian ini mencoba untuk menganalisis konflik yang terjadi di Desa Balinuraga dengan meletakkan perhatian pada mekanisme yang dilakukan oleh aktor-aktor konflik dalam pergerakan massa dengan mempertimbangkan keadaan serta beberapa aspek kultural masyarakat dan isu-isu yang digunakan sehingga para aktor akan

memutuskan untuk ikut bergabung di dalam kelompok massa penyerang. Untuk membantu menjelaskan pola pergerakan masa ataupun keterlibatan aktor dalam konflik ini, penelitian ini akan menggunakan kerangka Teori *Dynamic of Contention* dengan Studi Kasus sebagai salah satu jenis penelitian kualitatif tradisional.

## **2. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, menjadi sangat menarik untuk melihat motivasi keterlibatan aktor dan mekanisme pergerakan massa dalam konflik dan penyerangan yang terjadi di Desa Balinuraga. Dalam kerangka Teori *Dynamic of Contention* dijelaskan bahwa, dalam menjelaskan pola pergerakan massa konflik, menjadi penting untuk sebaiknya menjelaskan serentetan perubahan sosial yang luas mendahului konflik guna mempermudah melihat beberapa faktor penting penunjang dalam menjelaskan pergerakan, seperti pembentukan aktor serta pembentukan identitas yang terjadi. Sehingga sesuai dengan fokus permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Proses dan Mekanisme Pergerakan Massa dalam penyerangan yang terjadi di Desa Balinuraga?”

Sebelum menjelaskan tentang proses dan mekanisme pergerakan massa dalam penyerangan yang terjadi di Desa Balinuraga, penelitian ini akan mencoba menjawab dua pertanyaan turunan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana struktur sosial dan perubahan sosial masyarakat Lampung Selatan, khususnya masyarakat Kecamatan Way Panji dan Kecamatan Kalianda?
2. Bagaimana relasi sosial masyarakat Kecamatan Way Panji dan Kecamatan Kalianda sebelum terjadinya konflik dan penyerangan?

3. Apa motivasi keterlibatan aktor dalam melakukan penyerangan?
4. Bagaimana proses pergerakan massa yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam konflik antara Desa Agom dan Desa Balinuraga?

### **3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui struktur sosial dan perubahan sosial masyarakat Lampung Selatan, khususnya masyarakat Kecamatan Way Panji dan Kecamatan Kalianda.
2. Melakukan analisis konflik dengan melihat relasi sosial masyarakat Kecamatan Way Panji dan Kecamatan Kalianda sebelum terjadinya konflik dan penyerangan.
3. Menemukan motivasi keterlibatan aktor dan menganalisis mekanisme pergerakan massa dalam menyerang dan atau saling menyerang pada saat terjadi konflik di Desa Balinuraga.

### **4. Manfaat Penelitian**

1. Secara keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang perspektif yang lain dalam melihat dan menganalisis konflik tidak semata tentang analisis penyebab atau tujuan perumusan konsep rekonsiliasi yang ideal.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu untuk menyadarkan masyarakat secara luas, terutama bagi mereka yang terlibat bahwa kerugian secara material maupun secara mental tidak serta merta terjadi atas keinginan yang muncul dalam diri mereka, namun didalamnya telah terjadi politisasi

yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tujuannya untuk menguntungkan kelompok sosial tertentu.

## **5. Kerangka Konseptual**

### **5.1. Kemajemukan dan Perubahan Sosial Masyarakat**

Kemajemukan masyarakat Indonesia bukan merupakan konsep dan istilah baru dalam ranah perkembangan kajian ilmu sosial, J. S. Furnivall setidaknya telah membicarakan tentang kemajemukan Indonesia sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia. Menurut Furnivall, masyarakat majemuk atau *plural societies* yakni suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembaharuan satu sama lain di dalam kesatuan politik (dalam Nasikun, 2006: 35).

Struktur masyarakat Indonesia ditandai dengan dua ciri yang bersifat unik, secara horisontal ditandai dengan kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat serta perbedaan kedaerahan. Sedangkan secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Pada masa penjajahan kondisi ini ditunjukkan dengan bentuk stratifikasi dimana Eropah menjadi orang yang berada dalam golongan kelas penguasa, Timur Tengah, Tionghoa, dan India sebagai golongan menengah dan pribumi sebagai golongan masyarakat yang paling dasar (Nasikun, 2006: 34).

Dalam konteks struktur masyarakat dewasa ini, Indonesia lebih disibukkan dengan struktur masyarakat yang bersifat horisontal dimana kehidupan masyarakat yang tersegmentasi dalam unit-unit etnisitas saling bersaing untuk menempati kelas pertama dalam rangkaian struktur yang bersifat vertikal. Beberapa konflik yang

terjadi antar etnis menunjukkan kecenderungan ini. Di Sampit misalnya, konflik antara suku Dayak dan Maduru juga disebabkan karena adanya dominasi atas sektor-sektor pekerjaan yang ada dikota sehingga menyebabkan kecemburuan sosial dari masyarakat etnis Dayak yang merasa sebagai masyarakat yang lebih berhak atas semua akses tersebut.

Perbedaan secara horisontal tersebut ditunjukkan juga dalam kehidupan dari masyarakat etnis Lampung, Jawa dan Baliyang mencoba untuk hidup bersama dalam satu wilayah politis yang disebut kabupaten dan kemudian kegagalan komunikasi dalam masyarakat plural ini menyebabkan konflik sebagai konsekuensi yang nyata. Namun berbeda halnya dengan yang terjadi dengan konflik etnisitas yang terjadi di Sampit, konflik yangterja di di Desa Balinuraga tidak dapat sepenuhnya dikatakan bentuk perebutan posisi kelas sosial dalam masyarakat, namun juga tidak menutup kemungkinan kemudian bahwa ada beberapa pihak yang menganggap pertarungan ini merupakan sebuah upaya untuk memperebutkan atau meruntuhkan posisi kelas sosial.

Pierre L. van den Berghe menyebutkan beberapa karakteristik sebagaisifat-sifat dasar dari suatu masyarakat majemuk, yaitu:

1. Terjadinya suatu segmentasi kedalam bentuk kelompok-kelompok yang sering kali memiliki sub kebudayaan yang berbeda satu sama lain.
2. Memiliki struktur sosial yang terbagi kedalam lembaga-lembaga yang bersifat non komplementer.
3. Kurang berkembangnya konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar.

4. Secara relatif seringkali mengalami konflik-konflik diantara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya.
5. Secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di bidang ekonomi.
6. Adanya dominasi politik antara kelompok satu dengan kelompok-kelompok lainnya (Nasikun, 2006: 40-41).

Ada 3 (tiga) dari 6 (enam) kriteria sifat dasar yang menunjukkan bahwa adanya konflik dalam masyarakat majemuk merupakan sebuah konsekuensi dari kehidupan bersama masyarakat yang beragam. Meskipun kehidupan bersama cenderung dipaksakan dan coba dibangun atau *nature* oleh masyarakat beragam dalam satu wilayah yang relatif kecil, pada akhirnya dapat menyebabkan konflik dan penyerangan. Ini yang ditunjukkan dalam kehidupan bersama dengan masyarakat yang beragama - Jawa, Lampung, Bali - di Desa Agom dan Desa Balinuraga yang juga tidak dapat menghindari untuk tidak terjadi konflik.

Dalam ranah kajian ilmu sosial beberapa ahli Sosiologi (pendekatan konflik) menganggap bahwa konflik-konflik dan kontradiksi-kontradiksi intern dalam masyarakat dapat merupakan sumber bagi terciptanya perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan sosial, oleh para penganut pendekatan konflik tidak saja dipandang sebagai gejala yang melekat dalam kehidupan setiap masyarakat, akan tetapi lebih dari pada itu bahkan dianggap bersumber dari dalam faktor-faktor yang ada dalam masyarakat itu sendiri (Nasikun, 2006: 21).

Oleh karena itu, struktur sosial masyarakat dan perubahan sosial menjadi sangat penting dalam upaya memahami perbedaan yang terjadi, sekaligus menjadi pijakan

penting sebelum membahas tentang konflik yang terjadi dan akhirnya menganalisis pergerakan massa dalam konflik dan penyerangan di DesaBalinuraga.

## **5.2. Relasi Sosial dalam Lensa Teori *Dynamic Of Contention***

*Dynamic of contention* atau Politik Seteru merupakan pendekatan dan teori dalam memahami isu-isu gerakan sosial masyarakat. *Dynamic of contention* merupakan sebuah proyek besar yang dikembangkan oleh Doug McAdam, Tilly dan Tarrow dalam memahami fenomena gerakan sosial yang terjadi di berbagai konteks di sebagian belahan dunia. Namun lebih dari itu, banyak bagian dari *Dynamic of contention* menyangkut apa yang disebut sebagai “*transgressive contention*” yaitu perseteruan yang terjadi di luar batas-batas politik formal dan bisa mencakup protes-protes yang diwarnai kekerasan (Klinken, 2007: 17) sehingga pada akhirnya teori ini tidak hanya diaplikasikan di ranah gerakan sosial, namun lebih luas juga di aplikasikan dalam ranah konflik, baik itu yang beraras demokratisasi maupun nasionalisme.

McAdam, Tilly, dan Tarrow membangun teori *Dynamic of contention* berdasarkan lima belas studi kasus yang mencakup perseteruan-perseteruan non-Barat di antaranya protes-protes Tienmen pada tahun 1989, perseteruan non-demokrasi seperti halnya “Huru-Hara” Hindu-Muslim di India, atau gerakan-gerakan di bawah kondisi-kondisi negara yang sedang lemah misalnya pemberontakan “Mau-Mau” di Kenya. *Dynamic of contention* sendiri menitik beratkan permasalahan pada kerusuhan yang terjadi di luar kebiasaan dan berada di luar tubuh sebuah organisasi dan lebih melihat kerusuhan yang terjadi di ranah interaksi kolektif dan tidak dapat diterapkan dalam konteks satu objek ataupun objek yang homogen.

Dalam karya besarnya - *Dynamic of contention* - McAdam, Tilly dan Tarrow menjelaskan bahwa terdapat kurang lebih 44 mekanisme yang dapat dilakukan dalam menjelaskan dan menganalisis sebuah perseteruan secara jelas, baik itu yang bersifat demokratis maupun yang bersifat nasionalisme. Meskipun demikian, dalam konsep ini, terdapat 5 mekanisme yang paling penting dan paling fundamental dalam menjelaskan kerusuhan ataupun perseteruan yang terjadi, diantaranya:

1. *Identity Formation* (pembentukan Identitas); bagaimana suatu identitas bersama berkembang dalam suatu kelompok?;
2. *Scale shift* (atau *escalation*/ eskalasi); bagaimana sebuah konflik yang muncul kecil mengalami eskalasi sehingga melibatkan aktor-aktor yang jauh lebih banyak?;
3. *Polarization* (Polarisasi); bagaimana ruang politik antara pihak-pihak yang saling berseteru meluas ketika para peserta itu saling menjauh dan begeser ke arah titik-titik ekstrim?
4. *Mobilization* (Pergerakan); bagaimana orang yang biasanya acuh tak acuh dapat digerakkan untuk terjun ke jalan?
5. *Actor constitution* (pembentukan aktor); bagaimana sebuah kelompok yang sebenarnya tidak terorganisir dengan rapi atau politis berubah menjadi sebuah aktor politik tunggal? (Klinken, 2007: 17-18).

Kelima mekanisme di atas dianggap merupakan yang paling fundamental dan penting dalam menganalisis perseteruan politik. Namun demikian, meskipun *Dynamic of contention* sendiri merupakan sebuah kerangka teoritik dengan persepektif gerakan sosial baru, kerangka teoritik ini juga bukan suatu hal yang baru

jika digunakan pula dalam menganalisis beberapa kerusuhan atau konflik-konflik yang telah terjadi di Indonesia.

Dalam penelitian ini - rumusan masalah kedua - Relasi Sosial menjadi analisis penting yang dapat mengantarkan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam dalam memahami pola pergerakan konflik yang terjadi di Desa Balinuraga. Dalam konteks Sosiologis sendiri, Relasi Sosial atau Relasi antaretnis hanya bisa terjadi ketika setiap kelompok etnik terlibat dalam pertukaran sosial, kerja sama, persaingan dan konflik, serta ketika keterlibatan setiap kelompok etnis itu dibatasi oleh faktor status, peran, kelompok, jaringan interaksi, dan institusi sosial (Liliweri, 2005: 135).

Selain itu, Max Weber juga menyatakan bahwa, “suatu relasi sosial disebut komunal jika dan sejauh relasi tersebut memiliki orientasi sosial, diikuti oleh tindakan sosial (yang acap kali subjektif) dari semua pihak yang merasa menjadi bagian atau milik bersama dalam relasi tersebut. Kemudian, suatu relasi sosial disebut menjadi asosiasional kalau ada tindakan sosial yang rasional sebagai motivasi untuk memperoleh pengakuan atas kepentingan bersama” (Liliweri, 2005: 132-133).

Hubungan dan pola interaksi yang terjadi pasca konflik antara masyarakat etnis Lokal Lampung dan masyarakat etnis Pendatang (Jawa dan Bali) secara umum, maupun masyarakat Desa Agom dan masyarakat Desa Balinuraga secara khusus dapat menjadi sebuah deskripsi panjang dalam analisis fenomena konflik. Dari sebuah deskripsi panjang tersebutlah nantinya akan terlihat secara tersirat bagaimana progresivitas konflik itu bertumbuh (eskalasi konflik), serta bagaimana dari pola interaksi dan relasi sosial tersebut muncul batas-batas kesukuan karena melihat adanya perbedaan yang cukup mencolok antara mereka masyarakat etnis pendatang

dan masyarakat etnis lokal Lampung (pembentukan identitas), dan pada masa pra-konflik yaitu ketika masing-masing masyarakat mulai bersinggungan secara panas tentang permasalahan ideologis maupun perebutan materi maka muncullah aktor-aktor konflik yang pada akhirnya berperan masing-masing dalam kelompok masyarakatnya (pembentukan aktor).

Relasi sosial yang dimaksudkan dalam penelitian ini akan meliputi beberapa elemen penting yang juga menjadi tahapan penting dalam bingkai Teori *Dynamic of contention*, yaitu meliputi konteks Pembentukan Aktor, Pembentukan Identitas masing-masing kelompok (*Identity Formation*) dan Eskalasi konflik (*Scale Shift*).

Seperti halnya yang telah dijelaskan di atas, dalam memahami proses pergerakan massa, terdapat 5 tahap yang juga harus diperhatikan agar dapat menjadi dasar dalam menganalisis pergerakan massa dalam konflik. Sedangkan konsep Relasi Sosial dalam penelitian ini, yang menyangkut ketiga komponen dalam analisis *Dynamic of contention* dimaksudkan agar nantinya tidak terjadi keterputusan analisis dalam menjelaskan serentetan kasus konflik yang sangat kental dengan nuansa politis ini.

Pembentukan identitas dalam rentetan konflik komunal sendiri menempati posisi yang sangat penting untuk melihat mesin ataupun penggerak masing-masing kelompok sosial yang sedang berkonflik. Polleta dan Jasper (2001) menjelaskan bahwa:

“...kita telah mendefinisikan identitas kolektif sebagai hubungan kognitif, moral, dan emosional individu dengan komunitas, kategori, praktek, atau lembaga yang lebih luas. Identitas merupakan persepsi akan hubungan atau status kebersamaan yang mungkin sekedar dibayangkan dan tidak selalu harus dirasakan bersama-sama secara langsung, dan identitas ini berbeda dengan identitas pribadi meskipun mungkin bagian dari identitas pribadi.” (Dalam Klinken, 2007: 107 ).

Identitas sendiri terbentuk berdasarkan interaksi yang melintasi batas-batas identitas kelompok sosial tersebut dan identitas etnis sendiri terbentuk dan berkembang berdasarkan persaingan bukan melalui isolasi atau keterasingan. Literature mengenai identitas sendiri memiliki berbagai persepektif dan sudut pandang diantaranya yang bersifat Sosiologis dan yang bersifat Psikologis. Secara Sosiologis, bahasan tentang identitas ditempatkan kuncinya pada kerapatan jaringan sosial yang mewarnai identitas tersebut (interaksi). Sedangkan secara Psikologis, menempatkan perhatiannya tentang identitas pada titik apa yang orang-orang ketahui (kognisi), dan dalam hal ini identitas yang dimaksudkan oleh Doug McAdam, Tilly dan Tarrow dalam *Dynamic of contention* adalah persepektif Sosiologi yang lebih menekankan pada titik interaksi jaringan sosial identitas kelompok tersebut.

Sedangkan eskalasi konflik yang dimaksudkan dalam *Dynamic OfContention* adalah tentang proses berkembangnya konflik sehingga melibatkan lebih banyak orang dari masing-masing kelompok. Berbagai macam media dapat digunakan sebagai wadah untuk memupuk konflik ini menjadi semakin besar, baik media formal (organisasi kesukuan, ataupun adat, maupun pemerintah) dimasing- masing kelompok, ataupun media yang bersifat informal (warung kopi, dsb).

Pada konsep relasi sosial yang terakhir juga akan dibahas secara singkat tentang bagaimana pembentukan aktor dalam kelompok berkonflik. Pada titik ini, analisis yang dilakukan oleh peneliti haruslah sangat berhati-hati karena meskipun tahap ini merupakan tahap paling mudah untuk ditemukan dalam penelitian, namun menjadi tahap yang paling sulit untuk dibuktikan dan dengan pertanggungjawaban yang lebih berat juga tentunya. Namun pada tahap ini, *Dynamic of contention* melibatkan beberapa “mekanisme” dasar. Pertama, subjek (masyarakat

Desa Agom) menciptakan organisasi-organisasi mereka sendiri untuk memajukan kepentingan mereka sendiri, atau mengambil alih organisasi yang sudah ada. Dari organisasi atau pelebagaan ini, selanjutnya menghasilkan “*Reportoire*” sandiwara aksi yang inovatif yang punya efek yang kuat bagi lawannya namun juga berpotensi besar bagi para pendukungnya. Kemudian terjadinya pembedaan (peralihan identitas) antara kedua kelompok tersebut menjadi gejala selanjutnya dari kemunculan aktor dalam konflik.

Sebagai sebuah penutup, penulis menyajikan gambaran tentang relasi sosial masyarakat di Lampung Selatan terutama disekitar Desa Balinuraga dan Desa Agom. Paparan tentang relasi sosial pasca konflik ini bertujuan untuk menggantikan paparan tentang polarisasi konflik yang tadinya ingin dipaparkan sekaligus sebagai salah satu tahap penting dalam kerangka teori yang disajikan didalam *Dynamic of contention*. Polarisasi sendiri sejauh pengamatan dan observasi yang dilakukan peneliti dilapangan selama rentan waktu 3 bulan tidak ditemukan. Namun meskipun demikian dalam konteks lain permasalahan ini, aspek polarisasi konflik masih memungkinkan untuk dibahas dan diamati lebih lanjut.

### **5.3. Pergerakan Massa dari persepektif *Dynamic of Contention***

Dalam menganalisis konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Balinuraga dan masyarakat Desa Agom, peneliti mencoba meminjam konsep *Dynamic of contention* dalam menganalisis pola pergerakan massa yang dilakukan oleh masing-masing pihak ketika konflik berlangsung. Dengan permasalahan penelitian yang telah diajukan, maka peneliti akan memfokuskan perhatian pada mekanisme pergerakan massa yang disajikan dalam konsep *Dynamic of contention*. Namun demikian, dalam analisisnya nanti tidak menutup kemungkinan bahwa peneliti juga

sedikit banyak akan membahas tentang *actor constitution* atau pembentukan aktor karena tidak menutup kemungkinan nantinya ketika mencoba untuk memahami pola pergerakan massa di masing-masing pihak yang berseteru nantinya juga akan membahas beberapa mekanisme lain yang telah ada diatas sebagai sebuah kelengkapan dalam mencoba menganalisis secara mendalam dan menemukan jawaban penelitian secara utuh.

*Dynamic of contention* juga menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) mekanisme dasar dalam memahami pergerakan massa, diantaranya: *Pertama*, sederetan proses-proses perubahan sosial yang luas mendahului konflik. *Kedua*, tiap-tiap pihak melihat ancaman datang dari pihak yang lain dan/ atau melihat kesempatan-kesempatan yang menguntungkan dirinya sendiri. *Ketiga*, organisasi-organisasi yang sudah ada diberi tujuan-tujuan baru. *Keempat*, organisasi-organisasi melancarkan aksi-aksi kolektif inovatif untuk menentang pihak lain. *Kelima*, pada gilirannya hal ini mengarah pada sebuah eskalasi dalam hal rasa ketidakpastian, yang pada gilirannya kembali memperbesar ancaman atau kesempatan tadi.

Konflik yang terjadi antara masyarakat etnis Bali dan masyarakat etnis Lampung merupakan sebuah manifestasi dari tumpukan-tumpukan ketegangan yang telah terjadi bertahun-tahun lamanya antara kedua masyarakat etnis ini. Dengan menggambarkan historisasi konflik yang terjadi, yang telah digambarkan dalam rumusan masalah pertama penelitian ini, ditujukan agar gambaran tentang pola komunikasi antar etnis pra-konflik dapat membantu menganalisis motivasi gerakan maupun masing-masing aktor dalam mengelola konflik ini.

## **6. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Pendekatan kualitatif lebih menekankan penggunaan diri peneliti sebagai alat dan kepekaan peneliti dibutuhkan agar mampu mengungkap gejala sosial pada obyek penelitian dengan mengerahkan segenap fungsi inderanya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Studi kasus merupakan sebuah strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, ataupun sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus yang dilihat sangat jelas dan dibatasi oleh konteks waktu dan aktivitas. Penelitian ini akan melihat tentang proses pengorganisasian massa dan keterlibatan aktor politis dalam konflik di desa Balinuraga sehingga batasan waktu yang dijadikan acuan adalah pada masa-masa krisis konflik.

Metode ini dapat mengantarkan peneliti memasuki unit-unit sosial terkecil seperti perhimpunan, kelompok, keluarga, dan berbagai bentuk unit sosial lainnya. Dengan demikian, studi kasus dalam khasanah metodologi dikenal sebagai suatu studi yang bersifat komprehensif, intens, rinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upayamenelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer atau kekinian (Bungin, 2010: 20).

Robert Yin (1996) menyebutkan: “studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana; batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas; dan dimana; multi sumber bukti dimanfaatkan. Studi kasus itu lebih banyak berkutat pada atau berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan “*how*” (bagaimana) dan “*why*” (mengapa), serta pada tingkat tertentu juga menjawab pertanyaan “*what*” (apa/apakah) dalam kegiatan penelitian.”

Dengan menggunakan metode Studi Kasus diharapkan penelitian ini akan lebih mudah dalam melakukan analisis yang bersifat menghubungkan suatu fakta dengan fakta lainnya untuk membentuk sebuah pemahaman yang utuh terhadap permasalahan penelitian.

### **6.1. Lokasi/ Setting Penelitian**

Lokasi atau setting dari penelitian ini adalah di desa Agom serta di desa Balinuraga, Kabupaten Lampung Selatan. Lokasi ini dipilih karena karakteristik konfliknya yang memang sangat tajam serta keterlibatan kelompok massa yang terhitung besar.

### **6.2. Kebutuhan dan Jenis Data**

#### **6.2.1. Data Primer**

Data primer merupakan sumber utama penelitian yang langsung berasal dari objek dan diolah oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengamatan langsung peneliti dilapangan maupun hasil dari wawancara mendalam dengan informan penelitian yang telah ditentukan dengan pertimbangan keberimbangan data yang akan didapat untuk melakukan analisis.

### **6.2.2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari pihak lain untuk kemudian dapat diolah sesuai instrumen pengumpulan data yang dimiliki sehingga hasilnya dapat melengkapi data primer. Data sekunder ini terutama digunakan untuk memperkuat dan untuk memverifikasi data yang telah didapatkan dari informan utama yang telah ditentukan dan telah melakukan wawancara mendalam. Data sekunder juga diperoleh melalui studi literatur baik berupa buku, jurnal, penelitian terdahulu, situs internet serta dokumen-dokumen milik desa yang mendukung dan membantu peneliti untuk memperoleh informasi berkaitan dengan penelitian ini.

### **6.3. Teknik dan Proses Pengumpulan Data**

Bukti dan data dalam penelitian studi kasus bisa berasal dari enam sumber, yaitu: dokumen, rekaman arsip, wawancara, pengamatan langsung, dan perangkat-perangkat fisik (Yin, 2011: 101). Dari data yang dibutuhkan dalam metode studi kasus, seperti yang telah dijelaskan diatas, maka teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

1. Masuk dan berada langsung di kedua konteks masyarakat untuk melakukan pengamatan langsung serta pengamatan terhadap perangkat-perangkat fisik sehingga peneliti mendapatkan gambaran tentang keadaan masyarakat secara umum.
2. Mengumpulkan arsip-arsip ataupun dokumen yang sekiranya dapat membantu peneliti dalam menganalisis permasalahan yang dapat dikumpulkan dari instansi-instansi terkait.
3. Dalam metode penelitian studi kasus, wawancara merupakan salah satu instrument penelitian yang paling penting dan paling fundamental.

Wawancara dalam penelitian ini akan diawali dengan menggunakan teknik wawancara sambil lalu dengan tujuan memetakan informan penelitian yang sesuai dan memadai untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Ketika informan-informan penelitian telah jelas dan telah ditentukan, maka peneliti akan menggunakan teknik wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap.

Meskipun dalam penelitian ini kedua kelompok masyarakat akan menjadi objek kajian namun dalam pelaksanaannya peneliti lebih menekankan perhatian pada kelompok massa penyerang atau kelompok massa etnis Lampung karena mereka adalah kelompok massa yang cenderung melakukan pergerakan massa sedangkan masyarakat Desa Balinuraga cenderung merupakan pihak yang pasif (korban penyerangan).

Sejak awal penelitian ini akan dilaksanakan peneliti menyadari bahwa kebutuhan data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini mungkin saja sangat sensitif bagi pihak-pihak yang terlibat. Untuk itu, data-data yang didapatkan dalam penelitian ini seringkali berawal dari isu yang didapatkan dalam konteks penelitian sambil lalu atau observasi lapang, dan kemudian melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang telah dianggap memumpuni dan memiliki keterbukaan yang baik.

Dalam melakukan observasi lapangan seorang peneliti dimungkinkan untuk melakukan mobilitas yang tinggi dan berani serta memiliki kemampuan untuk memasuki kantung-kantung massa yang mungkin memiliki informasi terkait konflik yang terjadi di Desa Balinuraga, seperti warung-warung kopi, atau pangkalan-

pangkalan ojek karena mayoritas diantara mereka merupakan masyarakat etnis Lampung.

Banyaknya jumlah massa dan aktor-aktor yang terlibat dalam penyerangan yang terjadi di Desa Balinuraga membuat bangunan dan kelengkapan data yang didapat dan disajikan dalam penelitian ini didapat dari potongan-potongan kecil yang seringkali mengaitkan atau menjawab permasalahan satu sama lain namun telah dilakukan konfirmasi atau *cross check* data dengan pihak-pihak lain yang lebih berkompeten.

#### **6.4. Teknik Pengelolaan Data**

Analisis data dalam studi kasus jarang didefinisikan secara tegas dan kongkret. Namun, mengambil gagasan dari John W. Creswell tentang teknik menganalisis dalam penelitian kualitatif maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini akan melalui tiga tahap utama yaitu:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini diawali dengan membuat transkrip wawancara, memilah-milah dan menyusun data kedalam kategori yang berbeda dan disesuaikan dengan fokus permasalahan dari penelitian ini.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Gagasan umum apa yang terkandung dalam gagasan partisipan. Pada tahap ini, para peneliti kualitatif terkadang menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh.
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data. *Coding* merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan

sebelum memaknainya (Yin, 2011: 135). Dalam penelitian ini, *Coding* analisis dibedakan menjadi 4 bagian yaitu Eskalasi, Pembentukan Identitas, Pembentukan Aktor, dan Pergerakan Massa.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

#### **1. Kabupaten Lampung Selatan**

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak antara  $105^{\circ} 14'$  sampai dengan  $105^{\circ} 45'$  Bujur Timur dan  $5^{\circ} 15'$  sampai dengan  $6^{\circ}$  Lintang Selatan. Mengingat letak yang demikian ini, daerah Kabupaten Lampung Selatan seperti halnya daerah – daerah lain di Indonesia merupakan daerah tropis. Kabupaten Lampung Selatan bagian selatan meruncing dan mempunyai sebuah teluk besar yaitu Teluk Lampung. Di Teluk Lampung terletak sebuah pelabuhan yaitu Pelabuhan Panjang, dimana kapal-kapal dalam luar negeri dapat merapat. Secara umum , pelabuhan ini merupakan faktor yang sangat penting bagi kegiatan ekonomi penduduk Lampung. Sejak tahun 1982, Pelabuhan Panjang termasuk dalam wilayah Kota Bandar Lampung.

Secara administrasi wilayah Kabupaten Lampung Selatan mempunyai batas-batas. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur; sebelah Selatan dengan Selat Sunda; sebelah Barat dengan Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran, dan sebelah Timur dengan Laut Jawa.

Jumlah Penduduknya sebesar 912.490 jiwa, yang terdiri dari 470.303 jiwa laki-laki dan 442.187 perempuan. Sex ratio penduduk atau perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan 106,36 yang berarti bahwa setiap 100 jiwa perempuan terdapat 106 laki-laki. Penduduk yang paling banyak di Kecamatan Natar dan yang paling sedikit di Kecamatan Bakauheni.

Penduduk Kabupaten Lampung Selatan secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu penduduk asli Lampung dan pendatang. Penduduk asli

Lampung, yaitu etnik Lampung Peminggir, umumnya berkediaman di sepanjang pesisir pantai, seperti di Kecamatan Penengahan, Kalianda, dan Katibung.

Penduduknya terdiri dari beragam etnik, seperti Jawa, Sunda, Bali, Semendo, Banten dan lain-lain. Dari semua etnik tersebut, yang terbesar berasal dari pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Yogyakarta), dan Bali. Hal ini terjadi karena program kolonisasi dan transmigrasi, disamping karena migrasi swakarsa dan spontan.

- a. Program Kolonisasi pertama dari pulau Jawa dilakukan oleh pemerintah Kolonial Belanda pada November 1905. Lokasinya di Kecamatan Gedung Tataan dengan membuka desa baru, yaitu Desa Bagelen, berjumlah 155 Kepala Keluarga (KK), yang dipimpin oleh H.G. Heyting.
- b. Kolonisasi kedua di daerah Teluk Semangka, Kecamatan Wonosobo dan Kota Agung pada tahun 1921 dan 1922 sebanyak 6.021 jiwa yang dipimpin oleh W.C. Schalk Wijk.
- c. Kolonisasi ketiga dicoba sistem spontan di daerah Kota Agung dan Gedung Tataan pada tahun 1923 – 1927 berjumlah 1053 jiwa.
- d. Selanjutnya kolonisasi sistem sisipan yaitu yang disisipkan pada penduduk setempat, tidak dengan membuka lahan baru, dan sebagai obyeknya adalah di sekitar Kecamatan Kalianda yang dilaksanakan pada tahun 1934.
- e. Pada tahun 1935 – 1939 dilakukan lagi kolonisasi dengan sistem baru yaitu Bedol Desa, yang ditempatkan di daerah Kecamatan Talang Padang sekitar 27.816 jiwa berasal dari Kediri.
- f. Pada tahun 1950 – 1955 sebanyak 5.491 KK ditempatkan di Lampung Selatan. Tahun 1955 – 1969 sebanyak 5.333 KK ditempatkan di Kecamatan

Sidomulyo, Palas, Penengahan, Tanjungan dan Balau Kedaton. Pada tahun 1974, di Kecamatan Palas dan Penengahan dilakukan transmigrasi sisipan sebanyak 732 KK.

## **2. Desa Balinuraga dan Desa Agom**

Etnis Bali di Lampung, sebagian datang melalui program transmigrasi sekitar tahun 1960 yang ditempatkan di daerah Lampung Tengah dan Lampung Utara, sedangkan yang ditempatkan di Lampung Selatan kebanyakan transmigrasi swakarsa. Menurut tokoh Lampung yang dahulu menjabat sebagai Kepala Nagari Kalianda, Intan Mas Jahidin (91 tahun) diterimanya etnis Bali di Lampung Selatan berkat bantuan beliau saat masih menjabat sebagai kepala nagari.

Menurutnya, di tahun 1963 ada 5 (lima) orang warga Pulau Bali datang ke rumahnya dan minta bantuan untuk bisa menetap di Lampung Selatan. Mereka mengaku rumahnya hancur dan tidak memiliki apa-apa lagi akibat bencana, dan ingin melanjutkan kehidupan baru di Lampung. Kemudian, Intan Mas Jahidin memerintahkan untuk menjemput keluarga mereka di Pulau Bali dan memperbolehkan mereka hidup di tanah Lampung. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan asalnya di Pulau Bali. Di Lampung Selatan mereka kemudian mendirikan perkampungan Desa Balinuraga, Baliagung, dan Balinapal. Ada pula yang kemudian bergabung dengan warga etnis lain, seperti Desa Sidoreno, Palas, dan Sidomakmur. Warga yang tinggal di Desa Balinuraga adalah orang-orang Bali dari Nusa Penida Klungkung.

Desa Balinuraga adalah desa yang didirikan oleh transmigran asal Bali yang sudah berpuluh-puluh tahun bermukim di desa ini. Sebelum menjadi bagian dari Kabupaten Lampung Selatan, Desa Balinuraga termasuk dalam daerah Kabupaten

Lampung Timur. Setelah masuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Desa Balinuraga termasuk dalam wilayah Kecamatan Sidomulyo. Setelah ada proyek pemekaran wilayah, maka Desa Balinuraga menjadi bagian dari Kecamatan Way Panji. Jumlah penduduk Desa Balinuraga yang memiliki luas wilayah 920 Ha adalah 2.200 jiwa atau 500 KK. Penduduk Desa Balinuraga seluruhnya beragama Hindu dan mayoritas penduduknya adalah petani padi sawah, singkong, karet dan sawit dengan lahan luas, baik ada di dekat pemukiman mereka maupun di tempat lain. Pola pemukiman di Desa Balinuraga terpola seperti kompleks perumahan, jarak antar rumah saling berdekatan.

Para transmigran asal Bali pada saat mereka datang ke Lampung mereka sama sekali tidak diberikan bantuan ekonomi untuk upaya pembangunan, mereka hanya dibekali tanah yang belum digarap dan masih berupa hutan belantara yang dihuni oleh binatang-binatang buas. Pada dasarnya masyarakat etnis Bali mempunyai sifat yang ulet dan tekun dalam bekerja. Kini sejak mereka ditempatkan di Lampung, desa yang mereka bangun tergolong sangat maju dengan bangunan-bangunan megah dilengkapi dengan pura-pura yang berdiri tegak di pekarang rumah mereka masing-masing.

Sebaliknya, Desa Agom memiliki luas wilayah 630 Ha dengan jumlah penduduk sebesar 2.840 jiwa atau 791 KK. Penduduk Desa Agom didominasi oleh etnis Lampung dan transmigran etnis Jawa, selain itu terdapat etnis lain seperti Sunda, Betawi, dan Batak, pola pemukimannya cenderung berjauhan antar rumah yang satu dengan yang lain. Sebagian besar penduduk Desa Agom bermata pencaharian sebagai petani. Desa Agom merupakan desa yang didirikan oleh oleh masyarakat setempat atau lokal.

Pemukiman di Desa Agom yang dihuni oleh sebagian besar etnis Lampung hanya terdiri rumah-rumah yang terbilang sangat sederhana dibandingkan dengan bangunan yang ada di Desa Balinuraga. Pada kondisi tersebut kesenjangan sosial sangat terlihat ketika memasuki Desa Balinuraga yang sebelumnya melewati Desa Agom. Tidak bisa dipungkiri kondisi semacam ini akan menimbulkan kecemburuan sosial warga Desa Agom terhadap warga Desa Balinuraga sehingga dapat membuat konflik-konflik atau kerusuhan. Konflik atau kerusuhan seringkali terjadi, di samping adanya kecemburuan sosial juga karena warga Desa Agom memiliki perasaan tidak suka dengan etnis Bali dikarenakan banyaknya perbedaan di antara mereka juga dikarenakan kurangnya komunikasi warga Desa Balinuraga dengan warga Desa Agom.

### **3. Asal Mula Konflik Etnis Bali**

Konflik antara Desa Balinuraga dan Desa Agom bisa dianggap sebagai akumulasi dari konflik-konflik sebelumnya. Di antaranya, pada tahun 1982, akibat perselisihan warga Desa Sandaran dan Desa Balinuraga, warga Balinuraga membakar dua rumah warga Desa Sandaran. Tahun 2005 masyarakat Bali Agung di Kecamatan Ketapang membakar beberapa rumah penduduk di Desa Palas Pasemah. Kemudian pada 29 November 2011 masyarakat Balinuraga melakukan penyerangan ke Desa Marga Catur yang mengakibatkan 10 rumah dibakar dan 27 rumah lainnya dirusak. Peristiwa itu dipicu penusukan terhadap seorang siswa SMP, saat ada acara organ tunggal di Desa Marga Catur. Selanjutnya, pada 24 Januari 2012, masyarakat Desa Napal etnis Bali bersengketa dengan warga Desa Kota Dalam etnis Lampung. Peristiwa itu dipicu oleh keributan antar pemuda desa soal lahan parkir dan kebutuhan sepeda motor. Mereka yang tidak terima lalu merusak dan membakar

sejumlah rumah warga Desa Kota Dalam. Aksi itu juga melukai sejumlah warga. Aksi kekerasan itu dibalas dengan pergerakan ribuan orang dari Desa Kota Dalam dan sekitarnya untuk membakar serta merusak sekitar 89 rumah penduduk Desa Napal.

#### **4. Kronologis Konflik Etnis Bali dan Lampung**

Berawal dari peristiwa kecelakaan sepeda motor pada 27 Oktober 2012, pukul 16.00 WIB dengan korban gadis warga Desa Agom dan terindikasi pelaku merupakan warga Desa Balinuraga. Pada malam hari setelah kejadian, Kepala Desa Agom beserta satu orang perangkat desa dan satu orang perwakilan dari keluarga korban (korban warga Desa Agom) berinisiatif mendatangi rumah para pelaku yang menyebabkan korban terjatuh untuk meminta pertanggungjawaban dari para pelaku. Namun, tidak diperoleh kesepakatan berdamai.

Setelah rombongan Kepala Desa Agom menemui para pelaku tidak memperoleh hasil, Kepala Desa Agom berupaya untuk menemui Kepala Desa Balinuraga, tempat para pelaku tinggal. Kepala Desa Agom menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya kepada Kepala Desa Balinuraga bahwa mereka datang untuk meminta pertanggungjawaban Kepala Desa Balinuraga atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pemuda warga Desa Balinuraga terhadap warga Desa Agom. Dengan harapan masalah tersebut cepat dapat terselesaikan dan tidak menimbulkan konflik lagi. Terjadilah perundingan antara kedua Kepala Desa. Perundingan pertama tersebut juga tidak diperoleh kesepakatan untuk memenuhi tuntutan ganti rugi yang diminta oleh keluarga korban.

Masalah semakin kompleks dikarenakan korban kecelakaan tidak hanya berasal dari Desa Agom namun terdapat pula korban dari Desa Negeri Pandan.

Keluarga korban dari Desa Negeri Pandan melapor kepada Kepala Desa Negeri Pandan bahwa anaknya bersama anak dari Desa Agom terlibat masalah dengan anak dari Desa Balinurga. Keluarga korban dari Desa Negeri Pandan bersama kepala desanya beserta rombongan massa dari Desa Negeri Pandan menemui Kepala Desa Agom untuk meminta kejelasan terhadap permasalahan yang terjadi dan bermaksud langsung menuju Desa Balinuraga untuk meminta pertanggungjawaban. Aparat Desa Agom berusaha menghentikan massa yang ingin menuju Desa Balinuraga untuk sementara bertahan di Desa Agom. Sementara itu terjadi perundingan kedua, yang kali ini melibatkan Kepala Desa Agom, Kepala Desa Negeri Pandan, Kepala Desa Balinuraga, beserta kedua keluarga korban di rumah Kepala Desa Sidoharjo namun perundingan yang kedua inipun juga tidak memperoleh kesepakatan damai.

Setelah upaya menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan tidak menemukan kesepakatan damai sampai dengan pukul dua belas malam. Massa dari Desa Negeri Pandan yang sebelumnya masih dapat dibendung oleh aparat Desa Agom untuk tetap bertahan di Desa Agom, tidak mampu lagi untuk dibendung. Massa meneruskan berangkat menuju Desa Balinuraga. Setelah massa berangkat menuju Desa Balinuraga, aparat polisi baru datang ke Desa Agom. Kemudian Kepala Desa Agom beserta aparat polisi menyusul massa yang sudah terlanjur berangkat untuk berusaha kembali mencegah supaya tidak terjadi bentrokan. Massa yang masih berkumpul di sekitar Pasar Patok masih mampu untuk terkejar, namun massa yang ada jumlahnya sudah bertambah banyak, sekitar dua ribu orang.

Jumlah massa bertambah banyak dikarenakan di saat Aparat Desa Agom berusaha membendung massa dari Desa Negeri Pandan dan Desa Agom, informasi tentang perselisihan antara Desa Agom dengan Desa Balinuraga sudah mulai tersebar

kemana-mana. Perselisihan yang awalnya hanya melibatkan ketiga desa, kini melebar melibatkan desa-desa yang pernah terlibat kerusuhan dengan Desa Balinuraga. Dikarenakan jumlah massa lebih banyak dari aparat yang mencegah, massa tetap bisa sampai ke Desa Balinuraga.

Pada malam hari, 27 Oktober 2012, terjadilah bentrokan pertama antara Etnis Lampung dengan Etnis Bali Desa Balinuraga. Ketika massa yang berangkat menuju Desa Balinuraga sampai di desa tersebut, kondisi Desa Balinuraga gelap gulita. Peristiwa malam itu mengakibatkan satu kendaraan roda dua milik massa penyerang dibakar oleh massa dari Desa Balinuraga. Di samping perlawanan dari warga Desa Balinuraga, massa yang ingin masuk juga mendapatkan blokade dari aparat. Massa yang marah karena tindakan aparat, membalas aparat dengan membakar mobil polisi, dan merusak kawat berduri. Perlawanan dari massa membuat aparat tidak lagi bersikap keras dan cenderung melunak. Melihat kondisi yang ada, penggerak aksi berusaha menahan massanya untuk kembali lagi ke Desa Balinuraga dan tidak melanjutkan usaha untuk masuk ke Desa Balinuraga.

Massa masih bertahan, berkumpul di lapangan Desa Agom dan tidak mau dibubarkan untuk kembali ke rumah masing-masing. Ketika waktu memasuki pagi hari, massa yang berkumpul jumlahnya sudah semakin banyak bukan semakin berkurang. Pada hari berikutnya, 28 Oktober 2012, jumlah massa yang berkumpul diperkirakan berjumlah sekitar 20 ribu orang. Kembali terjadi bentrokan antara massa penyerang dengan massa Bali Desa Balinuraga di luar perbatasan Desa Balinuraga, tepatnya di Desa Sidoreno, massa penyerang tidak sampai masuk ke Desa Balinuraga. Sekitar jam sebelas siang, massa dari Etnis Lampung melakukan pembakaran terhadap warung milik warga etnis Bali yang bernama Sudaryo,

kemudian dilanjutkan dengan pembakaran rumah Pak Made Sukintre (Ketua Parisade Bali Tingkat Kabupaten) dengan menggunakan bom ikan. tidak korban jiwa dipihak etnis Bali Desa Balinuraga, sebaliknya di pihak etnis Lampung Desa Agom jatuh korban sebanyak 3 (tiga) orang meninggal dunia. Setelah timbul 3 (tiga) korban meninggal dunia, massa penyerang memutuskan untuk menghentikan usaha masuk ke Desa Balinuraga. Massa penyerang mundur kembali berkumpul di Lapangan Desa Agom.

Pada malam harinya terjadi rapat-rapat kecil di desa, massa diperintahkan untuk tidak masuk ke Desa Balinuraga pada pagi hari namun masuk sekitar pukul dua siang dan mengakhiri penyerangan pada pukul empat sore hari itu juga (29 Oktober 2012). Ini dikomando tetua adat Lampung yang memiliki kemampuan ilmu magis yang tinggi. Ketika massa menunggu sampai dengan pukul dua siang untuk masuk ke Desa Balinuraga, jumlah massa yang ada semakin bertambah banyak. Massa tidak hanya datang dari warga yang terdapat di Lampung Selatan, namun warga dari luar Lampung Selatan bahkan luar Provinsi Lampung pun ikut datang. Konflik yang semula hanya melibatkan warga desa setempat, meluas menjadi konflik etnis, yaitu antara etnis Bali Desa Balinuraga dengan etnis Lampung Desa Agom. Jumlah massa diperkirakan sekitar 30 ribu orang. Jumlah massa memadati jalan yang menghubungkan Desa Balinuraga dan Desa Agom sepanjang sepuluh kilometer serta mengakibatkan kemacetan jalur transportasi menuju dan keluar dari Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung.

Selama perjalanan menuju Desa Balinuraga, massa melewati Desa Sidoreno, dimana di Desa Sidoreno terdapat sekitar 40 kepala keluarga etnis Bali, yang sebagian ada yang sudah memeluk Agama Islam dan sebagian masih memeluk

Agama Hindu. Etnis Bali yang tinggal di Desa Sidoreno juga merupakan bagian dari etnis Bali Desa Balinuraga. Massa yang sudah terlanjur emosi, melampiaskan kemarahannya dengan merusak dan membakar segala jenis bangunan yang bercirikan Hindu di sepanjang perjalanan, terutama rumah atau bangunan yang pemiliknya dikenali sebagai warga Hindu. Massa yang sudah terlanjur emosional dan tidak dapat mengendalikan emosinya melakukan kekerasan pula terhadap warga Bali Islam yang tinggal di Desa Sidoreno. Untuk menghindari kemarahan massa, kebanyakan warga Bali Islam mencirikan rumahnya dengan meletakkan sajadah atau mukena (alat sholat) untuk membedakan mereka dengan Bali Hindu. Namun hal tersebut masih sulit untuk dikenali, karena rumah Bali Islam masih banyak memakai ukiran Bali, dan pemukiman antara Bali Islam serta Bali Hindu menjadi satu di dekat perbatasan Balinuraga, sehingga sulit untuk dibedakan.

Setelah berhasil masuk ke Desa Balinuraga, massa terbagi dalam enam regu dengan jumlah yang tidak sama dan menyebar sesukanya. Massa akhirnya berkonflik secara terbuka dengan massa Desa Balinuraga, berhadap-hadapan langsung, baik di sekitar rumah maupun di tengah persawahan. Awalnya etnis Bali Desa Balinuraga masih mampu bertahan, namun karena jumlah massa etnis Bali dengan etnis Lampung dan etnis lain pendukungnya tidak berimbang, lama kelamaan banyak timbul korban dari etnik Bali. Setelah ada korban manusia, pembakaran rumah, hewan, penjarahan barang, kerumunan massa etnis Bali mulai panik dan berusaha lari menyelamatkan diri.

Konflik, kerusuhan massa etnis Lampung dan etnis Bali di Desa Balinuraga berangsur-angsur berakhir pada pukul empat sore dihari yang sama, massa pun mulai beranjak meninggalkan Desa Balinuraga. Pada malam harinya diperkirakan massa

penyerang telah membubarkan diri dan kembali ke desa masing-masing. Peristiwa penyerangan tersebut telah menyisakan kerugian yang luar biasa, baik korban meninggal dunia, korban luka, maupun korban yang kehilangan rumah serta harta benda lainnya.

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Konflik dengan Kekerasan

Secara teoritis berbagai peristiwa konflik kekerasan yang bersifat “*ordinary and everyday violent conflict*” rumit untuk dideskripsikan. Salah satu kerumitan yang muncul adalah bagaimana melakukan analisis terhadap berbagai peristiwa yang ‘seakan-akan’ terjadi secara spontan, acak, tidak terorganisir dan juga tidak terpola. Kerumitan yang lain terletak pada bagaimana membuat analisis yang tidak meletakkan kajian terhadap konflik kekerasan sebagai peristiwa, melainkan sebagai sebuah proses yang kompleks, yang tidak semata-mata dilihat sebagai bentuk-bentuk ketidakpercayaan terhadap hukum dan aparat penegak hukum, atau sebagai bentuk frustrasi dari masyarakat yang secara sosio-ekonomi terrendah.

Dalam leksikon ilmu sosial dan kajian mengenai konflik dan kekerasan di Indonesia, peristiwa-peristiwa seperti penghakiman massa (*mob lynching*), *bullying*, tawuran dan perkelahian antar desa, antar kampung, antar komunitas, dan pengeroyokan dikategorikan sebagai “kekerasan rutin”. Pada umumnya, kekerasan rutin didefinisikan sebagai “*frequently occurring forms of violence (such as the beating of suspected thieves, inter-village brawls, or fights over plot of land, which are not part of a large or widespread conflict, and where the impacts of the single incidents are typically low (less than five deaths)*” (Barron, et,al 2009).

Mohammad Zoelfan Tadjoeeddin (2009), mendefinisikan kekerasan rutin sebagai “*neither civil war nor ethno-communal conflict. It refers to regular group violence that is not episodic in nature...routine violence may be a consequence of growth and globalization..it tends to occur spontaneously and sporadically without*

*being led by any organized gang. It also does not lead to capture of any one's possession...In general, routine violence can be a manifestation of frustration by the lower socio-economic segment of society rather than the greed of those involved*".

Murhsed, M. and Tadjoeeddin, Z (2008) mendefinisikan bahwa kekerasan rutin seringkali meliputi *vigilantisme*, perkelahian antar desa, antar kampung, antar komunitas, yang kadangkala juga memiliki dimensi kriminalitas. Kekerasan rutin diidentikkan dengan kekerasan sehari-hari yang mencerminkan adanya ketidakpuasan terhadap sistem hukum dan pemerintah daerah serta frustrasi yang menyebar di kalangan masyarakat.

Setidaknya, terdapat berbagai analisis dan pendekatan mengenai bagaimana kekerasan rutin semacam ini dapat terjadi. *Pertama*, terdapat studi yang menggunakan pendekatan psikologi sosial untuk menunjukkan bahwa kekerasan rutin atau "perang kecil" yang disebabkan oleh adanya "permusuhan, baik yang bersifat individualistis dan kelompok yang lebih luas maupun konflik yang melampaui batas identitas sosial, benturan struktur kebudayaan dipicu oleh adanya prasangka (Faturrahman, 1993: 6-7). *Kedua*, terdapat juga suatu studi yang meletakkan berbagai kategori tentang pengeroyokan dan tawuran sebagai *vigilantisme*, yang didefinisikan sebagai "praktik-praktik kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mengontrol perilaku warga yang menyimpang dari jalur hukum". Kekerasan jenis ini juga dikategorikan sebagai "*establishment violence*" yang bertujuan untuk meneguhkan dan mengukuhkan tatanan moral tertentu dan bersifat konservatif. Dalam kasus-kasus di Indonesia, penyebab dari aksi-aksi *vigilantisme* merujuk pada adanya ketidakpercayaan terhadap kinerja maupun norma hukum yang berlaku; *vigilantisme* juga terjadi pada saat tatanan

sosial dan hukum sedang mengalami keguncangan; dan kadangkala juga merupakan suatu kegiatan yang dibiarkan dan diabaikan oleh aparat penegak hukum (Mee, et, al: 2005).

*Ketiga*, studi yang lain mendeskripsikan konflik dan kekerasan sebagai peristiwa “amoek”, yang dianggap sebagai suatu bentuk kekerasan di depan publik. Dengan memanfaatkan studi-studi Foucault, pendekatan ini mendeskripsikan bahwa sebagai sebuah peristiwa kekerasan, amoek atau kekerasan di depan publik mestilah memiliki beberapa kategori, di antaranya adalah siksaan dalam peristiwa kekerasan publik itu mesti menggoreskan tanda ada korbannya sebagai tanda keberhasilan sebuah penghukuman; siksaan dalam kekerasan publik itu harus menunjukkan kekuasaan penghukum di depan publik. Oleh karena itu, di samping siksaan bersifat mengerikan, siksaan itu juga harus dapat dilihat oleh banyak orang. Namun, pada perkembangannya, amoek yang terjadi pada aras masyarakat lebih disebabkan oleh adanya *relative deprivation* yaitu ketidaksesuaian antara *value expectation* dalam masyarakat dengan *value capability* mereka. Kondisi deprivasi inilah yang kemudian menimbulkan frustrasi dan kemarahan yang memuncak dalam masyarakat.

*Keempat*, mengatakan kekerasan rutin terjadi karena *kombinasi tekanan populasi yang berhadapan dengan kelangkaan sumberdaya alam dengan masalah keadilan sosial yang diukur dengan ketimpangan distribusi pendapatan dan sumberdaya*. Populasi dan faktor demografi merupakan salah satu pilar penyangga kekerasan rutin. Sebab, peningkatan dan tekanan populasi akan menghasilkan suatu penurunan ketersediaan sumberdaya per-kapita, yang pada gilirannya akan menciptakan semakin banyaknya kompetisi yang berpotensi menghasilkan konflik.

Ada tiga indikator yang digunakan untuk menerangkan kekerasan rutin, yaitu *kepadatan populasi, banyaknya kaum muda, pertumbuhan populasi, dan keadilan sosial* yang diukur melalui *distribusi sumberdaya yang tidak merata dan ketimpangan pendapatan*. Ketimpangan pendapatan yang berada dalam level tinggi akan meradikalisasikan kelas bawah, memperkuat polarisasi kelas, dan menurunkan toleransi.

Ketimpangan dalam hal ini dilihat dalam dua aras: *horizontal inequality* dan *vertical inequality*. *Horizontal inequality* merujuk pada ketimpangan antar kelompok ethno-sosial atau antar-wilayah yang dapat diukur melalui rasio rata-rata pendapatan dari dua kelompok yang berbeda atau dari dua wilayah berbeda. Sementara *vertical inequality* merujuk pada Indeks Gini yang mengukur ketimpangan antara individu dengan keseluruhan populasi. Apabila ketimpangan horizontal mendorong munculnya deprivasi relatif antar kelompok, sedangkan ketimpangan vertikal menyebabkan deprivasi personal secara umum antara masyarakat yang miskin dengan masyarakat yang berpenghasilan sedang. Jika tekanan populasi dan ketimpangan digabung maka akan didapatkan sebuah proposisi bahwa kekerasan rutin merupakan hasil dari ketimpangan vertikal yang semakin intensif seiring dengan intensifnya tekanan populasi. Dengan kata lain, jika level ketimpangan dalam suatu masyarakat yang memiliki tekanan populasi besar, maka potensi terjadinya kekerasan rutin juga akan semakin membesar. Apalagi, jika kepadatan populasi dan level ketimpangan itu beriringan dengan banyaknya jumlah pemuda, maka hal itu akan semakin meningkatkan potensi kekerasan rutin.

## **2. Memahami Proses Konflik dengan Kekerasan**

### **a. Dinamika Kapital**

Salah satu kelemahan mendasar dalam menganalisis kekerasan rutin adalah melihat bahwa kekerasan rutin merupakan sebuah peristiwa yang bersifat sporadis dan spontan. Argumen semacam ini mengabaikan bahwa, dalam beberapa kasus, kekerasan rutin sebenarnya seringkali hanyalah ‘tampilan luar’ dan ‘konsekuensi’ dari berbagai proses-proses yang kompleks. Juga, terlalu mengandalkan untuk bertumpu pada suatu analisis, sebagaimana yang dianjurkan oleh Zoelfan Tadjoeddin, dkk, bahwa kekerasan rutin terjadi karena ketimpangan pendapatan yang hanya diukur dengan alat ukur indeks Gini semata. Analisis semacam ini mengabaikan bahwa ketimpangan pendapatan hanyalah sebuah konsekuensi dari proses lain yang mendahuluinya, dan bekerja secara terus-menerus, dan bekerja secara lebih kompleks. Dalam cara pandang yang terakhir ini, maka ketimpangan pendapatan bukanlah suatu *kondisi* yang tiba-tiba terjadi begitu saja, melainkan hasil sebuah *relasi* yang bisa berupa akumulasi, penjarahan, diferensiasi, dan eksploitasi, yang semuanya mencerminkan dinamika kapital yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama (David Mosse, 2007).

Proses-proses di atas barulah menciptakan suatu kondisi bagi terjadinya ketimpangan sosial. Dalam analisis tentang konflik dan kekerasan, ketimpangan sosial merupakan lahan subur bagi tersemainya konflik dan kekerasan yang lebih luas. Ia, pendeknya, menjadi *lokus bagi terciptanya konflik-konflik kolektif*. Dalam perspektif strukturalis (Hardiman, 2011), peristiwa-peristiwa kekerasan komunal bukan terjadi secara spontan dan kebetulan, melainkan terjadi dalam konstelasi-konstelasi sosial dan ketegangan-ketegangan, dan kontradiksi-kontradiksi tertentu yang hidup dalam masyarakat.

#### **b. Momen Koordinasi dan Pergerakan Massa**

Dinamika kapital saja bisa jadi menghasilkan konflik-konflik jenis lainnya, seperti konflik sumberdaya alam atau konflik ekonomi. Dalam kasus kekerasan rutin, dinamika kapital dalam pengertian proses-proses terjadinya akumulasi, penjarahan, diferensiasi dan eksploitasi hanyalah menciptakan lokus bagi lahirnya kekerasan rutin. Untuk itu, maka dibutuhkan beberapa aspek lain, dalam kasus kekerasan rutin, di antaranya adalah momen koordinasi dan terciptanya massa. Proses ini tercipta melalui relasi patronase dan pembentukan orang kuat lokal atau kelas perantara.

Kondisi ekonomi penduduk lokal akan terus meredup akibat tindakan penduduk pendatang melakukan akumulasi dengan penjarahan dan menguasai sektor perdagangan dan sektor informal. Akibatnya, pengangguran di kalangan pemuda merupakan angka yang tertinggi. Dengan latar belakang sosial ekonomi semacam itu, maka orientasi masyarakat pendatang adalah menjadi pegawai negeri dan bekerja di sektor pemerintah. Ketergantungan pada sumber-sumber negara, baik melalui mekanisme resmi menjadi pegawai negeri sipil maupun melalui aktivitas *black economy*—suatu aktivitas untuk mengambil dan menjarah sumber-sumber keuangan negara (*rent seeking*) melalui jaringan patronase untuk kepentingan kelompok dan jaringan tersebut. Pada dasarnya, ketergantungan pada sumber-sumber negara memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi penduduk lokal. Ketergantungan juga semakin menguat dengan model *state-led developmentalism*—dimana pembangunan-pembangunan daerah-daerah dipacu, ekspansi peran birokrasi yang diperluas, serta anggaran pembangunan dapat menciptakan lapangan kerja bagi penduduk lokal. Salah satu efek dari model semacam ini adalah semakin meningkatnya jumlah pegawai negeri secara dramatis dan pengambilan pungutan

dari sumber-sumber keuangan negara serta menurunnya jumlah pekerja di sektor pertanian (Klinken, 2007).

Berbagai hal itu berkombinasi dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja dan lulusan pendidikan formal dan semakin lajunya urbanisasi. Seringkali terjadi kekerasan rutin dalam bentuk tawuran antar kampung, antar desa berkoinsidensi dengan dorongan untuk memburu pungutan dari sumber-sumber keuangan desa, konflik yang paling sering terjadi adalah konflik antar pemuda, antar kampung, antar desa. Perkelahian antar pemuda, antar kampung, antar desa pada umumnya merupakan perkelahian antar kelompok yang melibatkan penduduk kampung.

Konflik ini seringkali melibatkan pemuda dan bahkan menimbulkan korban jiwa. perkelahian antar kampung, antar desa ini memiliki tingkat ketegangan yang cukup besar. Bagi sebagian pejabat dan beberapa orang, perkelahian antar kampung, antar desa diakibatkan oleh persoalan minuman keras dan pesta. Namun, pada dasarnya, proses pembentukan kekerasan dan konflik antar kampung, antar desa ini bekerja dalam cara yang lebih kompleks. Kekerasan dan konflik ini banyak diantari dan difasilitasi oleh kelompok kekerasan yang pada umumnya merupakan orang kuat lokal, yang bisa berupa elit kampung, elit desa, preman, atau orang-orang berpengaruh lainnya. Jaringan-jaringan patronase itu pada akhirnya membentuk apa yang disebut sebagai orang kuat lokal. Pada konflik yang berupa perkelahian antar kampung, antar desa, dan konflik politik, aktor sekuritisasi pada umumnya adalah orang kuat lokal, yang pada umumnya merupakan elit kampung, elit desa, preman, atau tokoh-tokoh berpengaruh di tingkat kampung, tingkat desa.

Ada proses yang beragam tentang menjadi atau menjadikan orang kuat lokal. Pada umumnya, orang kuat lokal di beberapa perkampungan, desa merujuk pada

kekuatan dan kekuasaan beberapa individu tersebut yang dapat memobilisasi dan memengaruhi massa yang lebih banyak. Proses tentang bagaimana ‘penokohan’ tersebut terjadi sangat beragam. Beberapa orang, misalnya, menjadi orang kuat lokal dikarenakan ia merupakan elit di kampung/desa, sebagian yang lain ditentukan oleh kekuatan dan kebesaran pengaruh keluarganya di tingkat kampung/desa, dan sebagian yang lain ditentukan oleh pengaruh politiknya atau kekayaan yang dimilikinya.

Proses menjadi atau menjadikan orang kuat lokal ini seringkali ‘difasilitasi’ oleh kekuatan-kekuatan dan proses-proses politik yang lebih besar. Di titik inilah, peranan kelas perantara (*intermediary class*) yang pada umumnya merupakan suatu kelompok yang terdiri dari kelas kapitalis kecil, elit-elit agraris, pejabat negara lokal yang memainkan peranan melalui pemburuan pungutan dan *black economy* (pendapatan gelap) yang diambil dari sumber-sumber negara memiliki peranan penting. Kelas perantara ini di antaranya memiliki ciri bahwa ia merupakan lingkaran hubungan-hubungan sosial yang terorganisir dan mendominasi birokrasi dan proyek-proyek negara di tingkat lokal. Kelas-kelas ini secara efektif dapat memblokir proyek pembangunan negara dengan jalan menghubungkan negara dengan *black economy*. Dengan demikian, mereka mengatur sumber-sumber ekonomi melalui sarana non-negara sambil melakukan *rent-seeking* dan memaksakan praktik-praktik regulatoris dengan memadukan hubungan personal dan reputasi individual dengan kekuatan-kekuatan ekstralegal, plus asosiasi-asosiasi dengan jaringan-jaringan orang kuat lokal yang dapat berdasar pada identitas etnis atau agama (Klinken, 2007: 75-76).

Pada tahapan formasi dan peneguhan identitasnya kelas perantara ini turut mempengaruhi bagaimana orang kuat lokal ini terbentuk. Misalnya, proses itu pada

umumnya terbentuk melalui proses politik elektoral. Misalnya, di tingkat kampung/desa pada umumnya dibentuk oleh aktivitas di ‘ruang-ruang publik’ semacam tempat nongkrong untuk minum-minuman keras dan bergerombol. Dari ruang semacam itu biasanya kelompok tersebut berasosiasi dan membentuk solidaritasnya. Ruang itu merupakan sumbangan dari para kandidat politik yang menyediakan tempat untuk berkumpul tetapi sekaligus meminta pada orang kuat lokal (preman, orang kuat lokal, pemimpin cultural, dan sebagainya) yang biasanya menjadi pemimpin kultural di lokasi tersebut untuk menyumbangkan suara dan memobilisasi orang untuk kandidat tersebut.

Bagi para orang kuat lokal, momen itu sekaligus menjadi momen untuk meraih keuntungan ekonomi. Ruang-ruang itu pada akhirnya mengalami pergeseran: dari ruang untuk konsolidasi politik di momen politik elektoral menjadi ruang untuk membangun solidaritas di dalam kampung/desa oleh orang kuat lokal untuk momen-momen tertentu. Sementara, pada momen politik elektoral, orang-orang kuat lokal ini seringkali dijadikan sebagai ‘agen pengaman’ untuk kandidat tersebut. Dan pada momen pasca elektoral, orang-orang kuat lokal dan berpengaruh ini juga seringkali diandalkan untuk menjadi pionir bagi terselenggaranya proyek-proyek pemerintah yang bersentuhan langsung di tingkat masyarakat. Seluruh proses tersebut pada dasarnya adalah proses untuk membangun dan memelihara dukungan politik dan relasi antara kelompok-kelompok kelas perantara tersebut dengan jaringan orang kuat lokal lainnya. Karena itu, tak mengherankan jika eskalasi sebuah perkelahian antar kampung/desa dalam banyak hal ditentukan sejauhmana keterlibatan orang kuat lokal tersebut.

Proses pembentukan massa, selain melalui jaringan patronase tersebut, juga dibalut oleh adanya proses pembentukan identitas melalui stigma. Dalam situasi konflik, stigma selalu memainkan peranan penting. Stigma disini berfungsi sebagai “isolasi satu kelompok terhadap kelompok lain, melalui penyebaran wacana yang seringkali diterima begitu saja sebagai kebenaran”. Stigma ini berfungsi sebagai proses pembentuk “identitas kolektif” yang begitu penting dalam momen koordinasi konflik, karena ia dapat menyeragamkan pikiran dan tindakan massa. Dalam kasus perkelahian antar kampung/desa, stigma yang bekerja pada umumnya berupa tuduhan bahwa suatu kampung cenderung memiliki kebanggaan atas tradisi tawuran dan perkelahian, suatu kampung memiliki banyak ‘preman’ yang memelihara wibawa dan gengsi daerahnya, suatu kampung banyak melahirkan orang-orang kuat lokal, pejabat pemerintahan, dan akademisi dan lain sebagainya. Stigma ini pada akhirnya membangun identitas kampung kuat sembari mengidentifikasi dan memberi perbedaan pada kelompok lainnya.

Konflik dan kekerasan komunal dengan pengerahan massa tidak bisa diabaikan. Berbagai alasan untuk segera mengatasi seringnya terjadi kekerasan rutin, kekerasan komunal, di antaranya *Pertama*, kita akan mendapati suatu *tragedy of endowment*—suatu kondisi dimana kekayaan sumberdaya alam menjadi pemicu konflik dan kekerasan serta menjadi ajang perebutan. Konflik-konflik sumberdaya alam yang pada umumnya meliputi konflik di kawasan desa, perkebunan, dan sumberdaya ekonomi lainnya merupakan jenis konflik yang luar biasa banyaknya. Tanpa upaya sistematis untuk menuntaskan konflik semacam itu, maka konflik-konflik semacam itu akan berubah menjadi siklus kekerasan yang tiada habisnya. Ini juga akan menghasilkan suatu “krisis sosial-ekologis” yang tiada tara. *Kedua*, jika

jaringan patron klien, komunalisme dan tindak premanisme atau bosisme serta patronase terhadap orang kuat lokal (*local strongmen*) semakin menguat, maka kita akan mendapati suatu kondisi ‘*defisit keadilan dan perdamaian*’, dimana kekerasan politik, kekerasan yang berbasis identitas komunal (etnis, agama dan kekerabatan) menjadi fitur utamanya. Dalam situasi semacam ini pula, maka bentuk-bentuk penguasaan oleh preman-preman kriminal dan para aktor kekerasan menjadi suatu keharusan. *Ketiga*, jika perlemahan kapasitas pemerintah daerah dalam pencegahan, penanganan dan transformasi konflik dan perdamaian terus terjadi, dimana hal ini beriringan dengan penguatan jaringan patronase dan komunalisme dan krisis pengelolaan sumberdaya alam, maka kita akan mendapati suatu fenomena gagalnya kepemimpinan daerah, dimana daerah gagal menjalankan fungsi-fungsi dasarnya sebagai satu-satunya aparat dalam memenuhi layanan dasarnya, dimana faksi-faksi politik dan kelompok kepentingan bertikai menggunakan instrumen kekerasan untuk mendapatkan tujuannya.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

1. Kecenderungan untuk mendangkalkan kekerasan rutin hanya semata-mata sebagai peristiwa rutin, atau hanya bertumpu pada kategorisasi mengenai banyak tidaknya jumlah korban akan mengabaikan analisis terhadap proses-proses yang kompleks, historis dan mendalam.
2. Kekerasan rutin seakan-akan hanya menjadi semacam fenomena yang banal dan dangkal. Begitu juga dengan analisis kekerasan rutin yang bertumpu karena kombinasi tekanan populasi yang berhadapan dengan kelangkaan sumberdaya alam dengan masalah keadilan sosial yang diukur dengan ketimpangan distribusi pendapatan dan sumberdaya. Seluruh model analisis semacam itu, pada akhirnya mengabaikan bahwa dalam berbagai kasus kekerasan rutin, selalu terdapat proses-proses yang kompleks.
3. Kekerasan rutin tidak semata dipandang sebagai semata-mata sebuah peristiwa, melainkan sebagai sebuah konsekuensi dari proses yang kompleks. Demikian juga dengan mudahnya pergerakan massa dikarenakan banyaknya bermunculan atau dimunculkan orang kuat desa yang mampu mempengaruhi banyak orang untuk memnuhi kepentingan orang kuat desa.

#### **Saran**

1. Salah satu cara untuk melakukan analisis terhadap kekerasan rutin adalah dengan mengajukan pendekatan ekonomi politik konflik dan kekerasan. Ini dilakukan dengan cara menganalisis dinamika kapital, yaitu dinamika bagaimana eksploitasi, akumulasi, penjarahan, dan marginalisasi berlangsung

dalam proses sejarah yang panjang. Analisis semacam itu untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana bagaimana lokus-lokus bagi terciptanya konflik-konflik kolektif dapat terbentuk.

2. Dengan analisis ekonomi politik kekerasan akan dapat digambarkan konstelasi-konstelasi sosial dan ketegangan-ketegangan, dan kontradiksi-kontradiksi tertentu yang hidup dalam masyarakat.
3. Perlu suatu analisis lain mengenai bagaimana momen koordinasi dan terciptanya massa. Untuk membaca pola yang terakhir ini, kita memerlukan analisis mengenai bagaimana jaringan patrimonial dan pembentukan orang kuat lokal terbentuk. Dengan cara semacam ini, maka kekerasan rutin dapat dibaca dan dianalisis melalui relasi-relasi dan proses-proses yang lebih kompleks.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barron, Patrick, et, al (2009). "Understanding Violent Conflict in Indonesia: A Mixed Methods Approach." Dalam *Social Development Papers*, Edisi *Conflict, Crime and Violence*. Paper No. 117/ June 2009.
- Burhan Bungin. 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Creswell, John. W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- David Mosse, (2007). "Power and the Durability of Poverty: a Critical Exploration of The Links between Culture, Marginality and Chronic Poverty". CPRC Working Paper, No. 107.
- Faturrochman, (1993) "Perang Kecil: Problem yang Tak Berakhir", *Jurnal Psikologi, Universitas Gadjah Mada*. No. 2.
- Klinken, Gerry van. 2007. *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Liliweri, Alo. 2005. *Prasangka dan Konflik*. Yogyakarta: LKiS.
- McAdam, Doug, Sidney Tarrow, Charles Tilly. 2004. *Dynamics of Contention*. New York: Cambridge University Press.
- Nasikun. 2006. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Shapiro, Stephen. (2008), *How To Read Marx's Capital*. London: Pluto Press.
- Tadjoeddin, Muhammad Zoelfan. (2007). *A Future Resource Curse in Indonesia: The Political Economy of Natural Resources, Conflict and Development*. Crise Working Paper No. 35 October.
- Tadjoeddin, Muhammad Zoelfan and Mansoob Murshed, (2008). "Decentralization Conflict Abating? Routine Violence and District Level Government in Java, Indonesia". *Microcon Research Working Paper 7*, July 2008.
- Tadjoeddin, Muhammad Zoelfan (et, al) (2011) "Routine Violence In The Island of Java, Indonesia: Neo-Malthusian and Social Justice Perspective". Unpublished paper.
- Tarrow, Sidney G. (1994). *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*. New York: Cambridge Press.
- Yin, Robert K. 2011. *Studi Kasus, Desain&Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.